

Judul : Perlindungan pekerja rumah tangga terabaikan
Tanggal : Sabtu, 25 Juni 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Terabaikan

PROSES Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang ditujukan untuk melindungi jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia mandek begitu saja. Padahal, proses pembahasan RUU PPRT sudah berlangsung 18 tahun lalu, sejak diusulkan ke DPR pada 2004.

Wakil Ketua MPR Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Lestari Moerdijat mempertanyakan kemauan politik pimpinan DPR untuk menghadirkan perlindungan bagi PRT.

"Rumusan RUU PPRT yang sejak 2020 disahkan di tingkat Badan Legislasi tidak kumung di bawa ke Sidang Paripurna untuk disepakati sebagai RUU usulan DPR. Kepedulian pimpinan DPR terhadap upaya perlindungan kepada setiap warga negara dipertanyakan," ucap Rerie, sapaan Lestari, dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Rerie mendesak pimpinan segera menuntaskan pembahasan dengan mengedepankan aspek perlindungan warga negara dan kemanusiaan. Ia mendorong langkah transparansi dalam mengatasi sejumlah kendala yang dihadapi pada proses legislasi RUU PPRT.

Catatan Jaringan Nasional Advokasi (Jala) PRT berdasarkan survei pada 2015 menyebutkan jumlah PRT di Indonesia sebanyak 4,2 juta orang. Jala PRT memperkirakan pada 2022 jumlah PRT di Indonesia berkisar 5 juta orang. Angka tersebut belum termasuk PRT yang bekerja

di luar negeri.

Menurut Rerie, PRT rentan tertimpa permasalahan yang merugikan baik PRT maupun pemberi kerja. Bahkan, sering kali kekerasan hingga masalah kemanusiaan menimpa PRT yang mayoritas perempuan dan anak.

Kondisi rentan PRT, tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus diatasi dengan hadirnya kepastian regulasi seperti RUU PPRT. Apalagi, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar negara melindungi setiap warga negaranya dari berbagai ancaman, termasuk ancaman tidak adanya kepastian hukum yang kerap mengancam jiwa pada pekerjaan yang digeluti PRT.

Pada kesempatan sebelumnya, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan sosialisasi isu pentingnya perlindungan pekerja rumah tangga kepada masyarakat masih belum meluas. Itu turut berdampak pada mandeknya pembahasan RUU PPRT karena dianggap bukan prioritas.

Andy menegaskan RUU PPRT sangat mendesak untuk disahkan sebagai upaya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak PRT. "Kampanye ini masih harus kita tingkatkan apalagi keterjangkauan isu PRT pada kelompok anak muda belum masif dan meluas jika misalnya kita bandingkan dengan bagaimana dukungan yang ada untuk menghasilkan Undang-Undang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual)." (RO/Ant/P-2)